



SINKRONISASI PERENCANAAN PUSAT DAN DAERAH

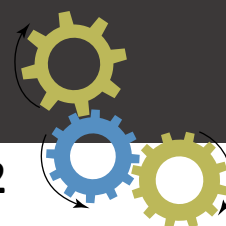
Disampaikan dalam Forum Konsultasi Publik Rancangan RPD
Prov. Kalimantan Timur Tahun 2024-2026

Iwan Kurniawan, ST., MM.
Direktur Perencanaan, Evaluasi, dan Informasi Pembangunan Daerah
Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah
Kementerian Dalam Negeri

16 Februari 2023



1 Pembangunan Daerah





Pembangunan Daerah

Pasal 258 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014



Pelaksanaan pembangunan daerah bertujuan untuk:



Peningkatan dan
Pemerataan
Pendapatan Masyarakat



Peningkatan dan
Pemerataan
Kesempatan Kerja



Peningkatan dan
Pemerataan
Lapangan Berusaha



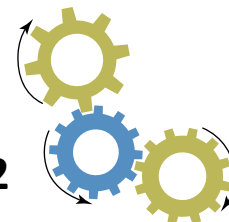
Peningkatan dan
Pemerataan
Akses dan Kualitas
Pelayanan Publik



Peningkatan dan
Pemerataan
Daya Saing Daerah



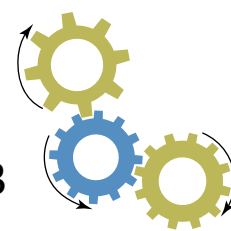
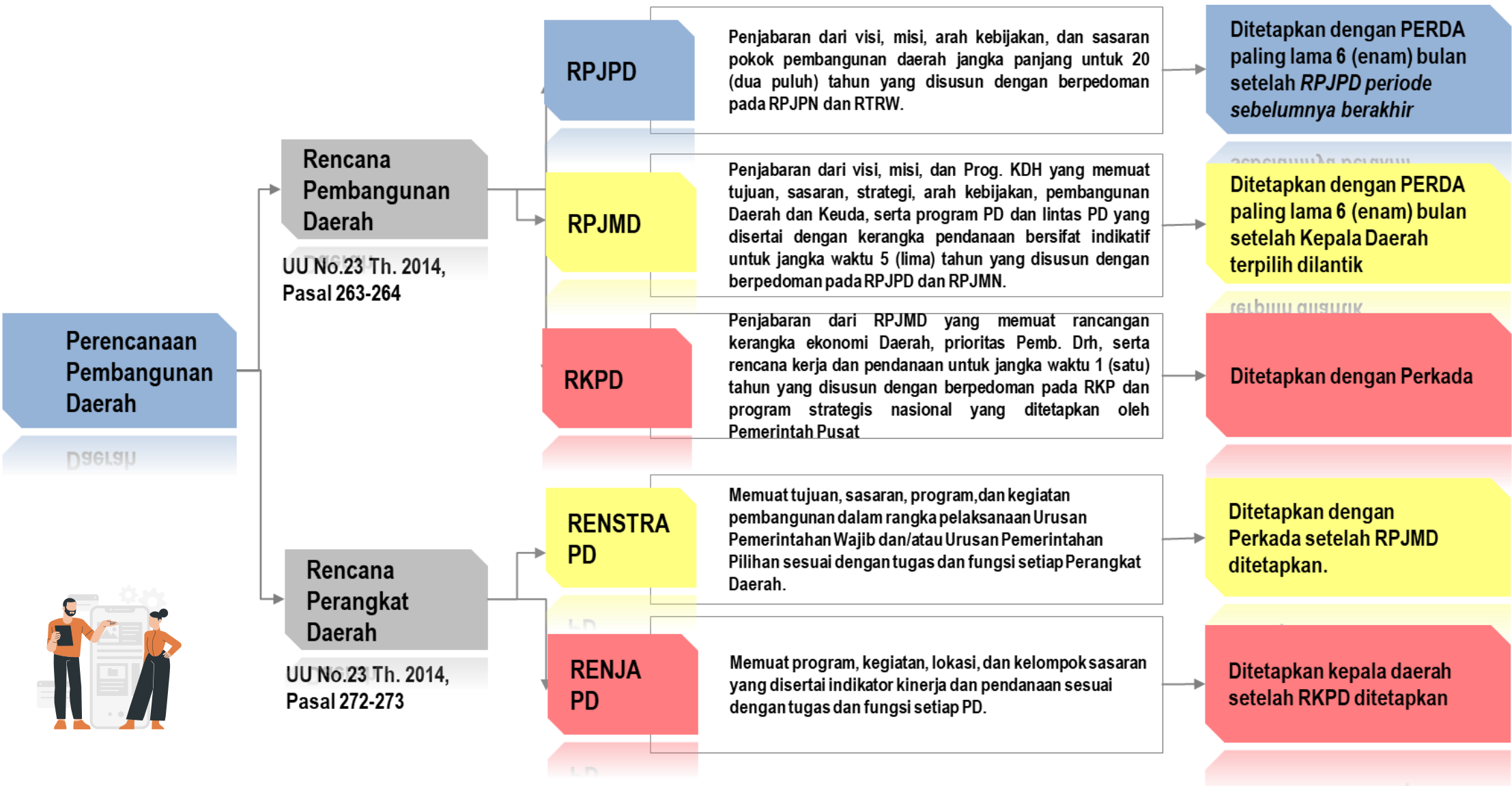
Merupakan perwujudan dari pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang telah diserahkan ke Daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional





Dokumen Perencanaan & Pembangunan Daerah

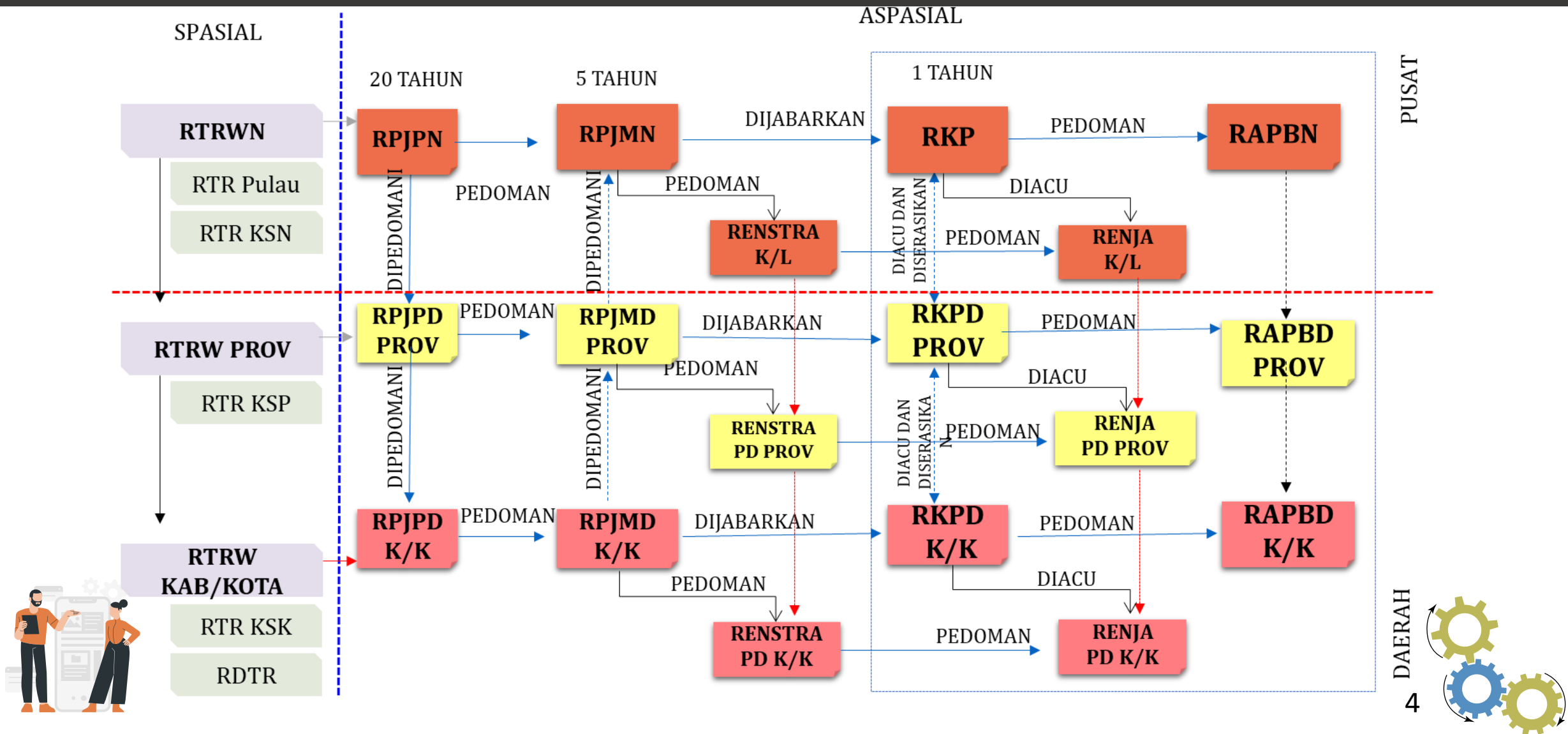
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014





Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Nasional dan Daerah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014





Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022



Kepala Daerah Yang
Jabatannya Berakhir
Tahun 2023 dan DOB

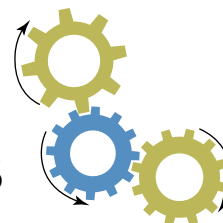
1 Agar menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2024-2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026

2 Agar memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah (PD) untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026

3 Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah



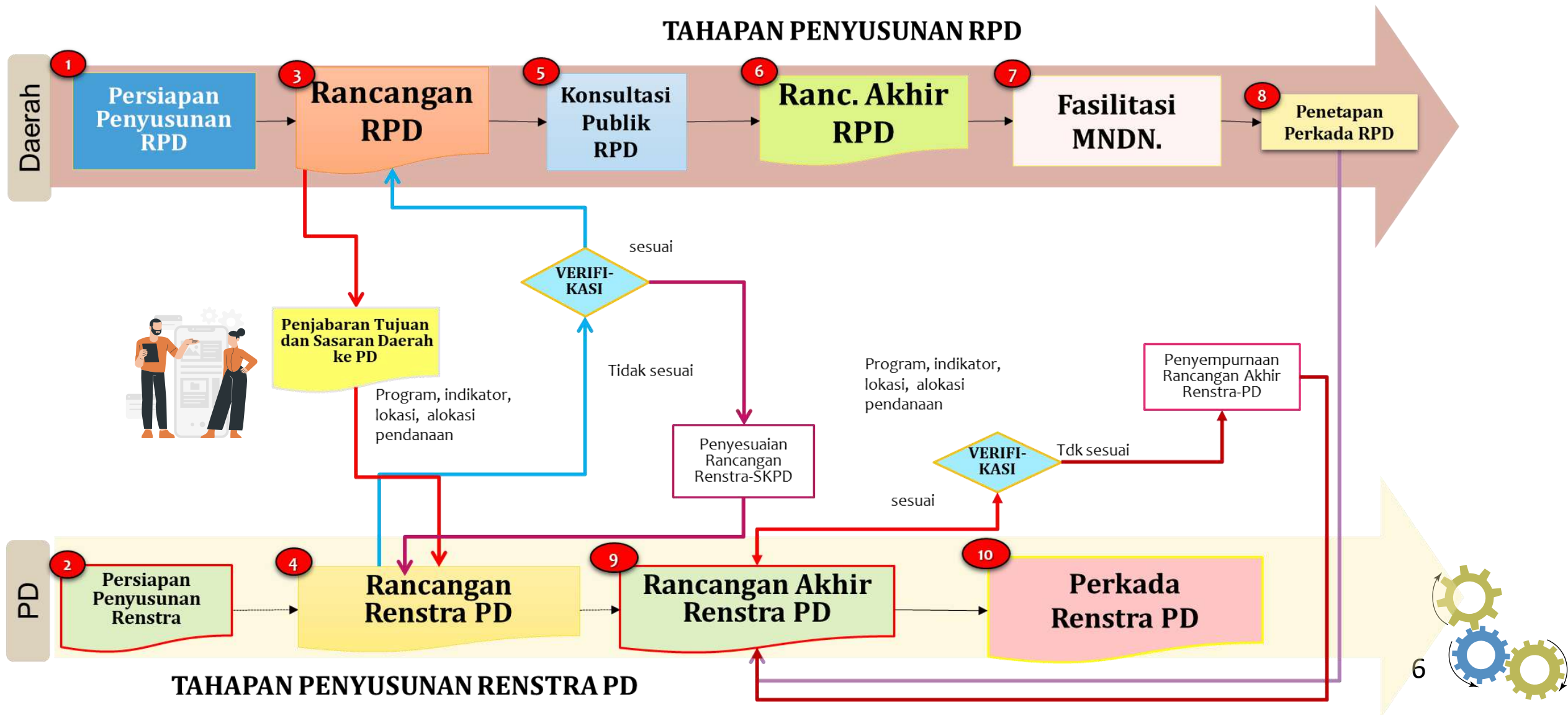
NB : Terkait kebutuhan teknis agar Bappeda Provinsi berkoordinasi dengan Kemendagri (Ditjen Bina Bangda), dan Bappeda Kabupaten/Kota agar berkoordinasi dengan Provinsi (Bappeda Provinsi)





Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Nasional dan Daerah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014





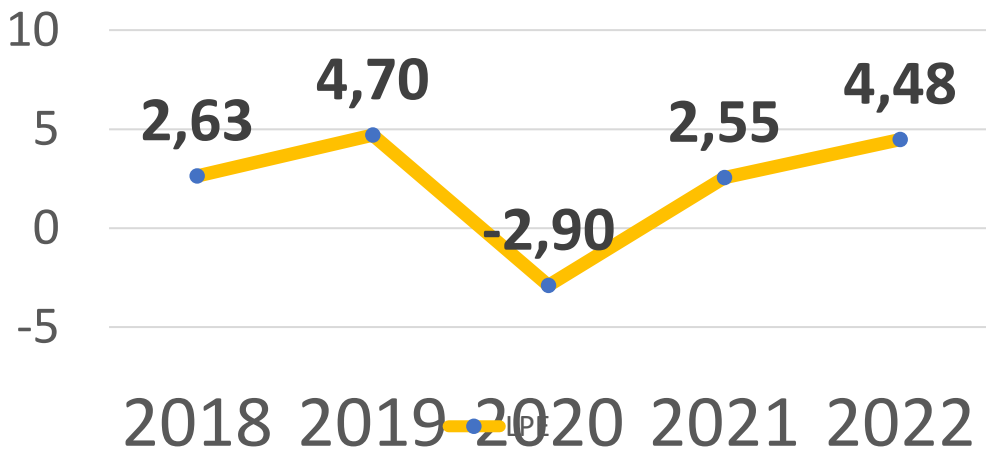
2 Capaian Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur



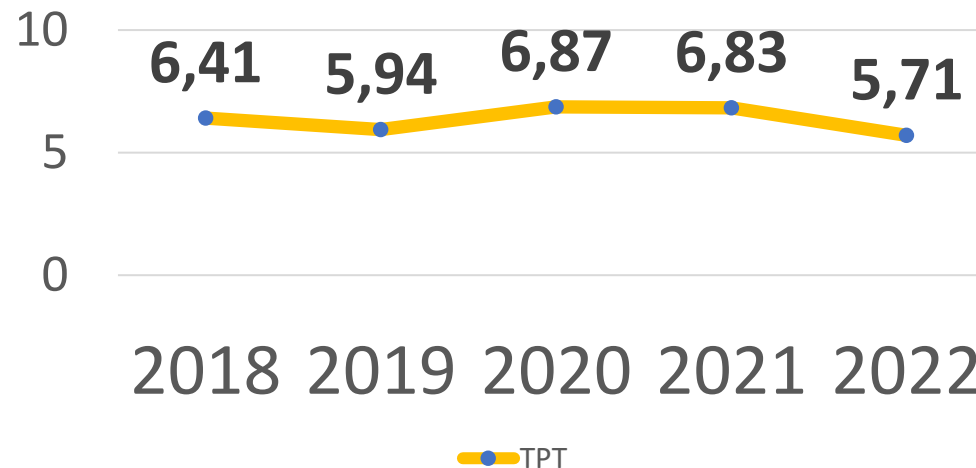


Capaian Indikator Pembangunan di Prov. Kaltim

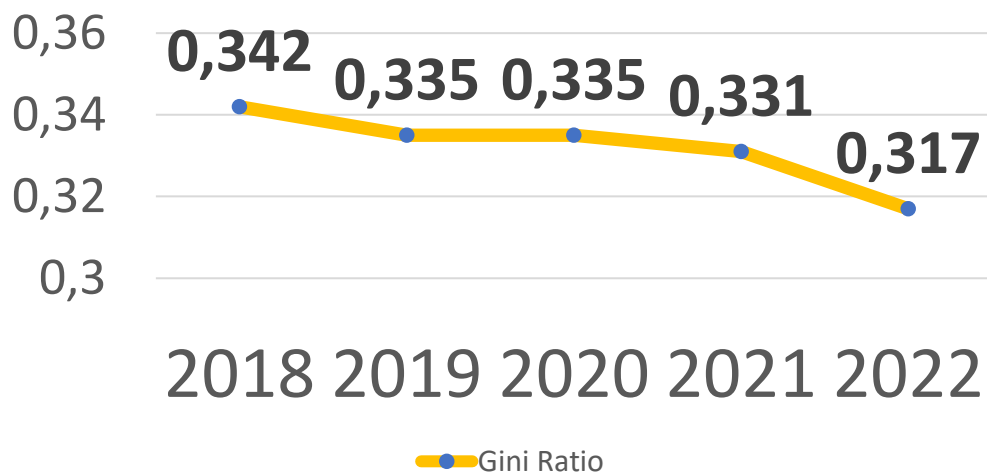
Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)



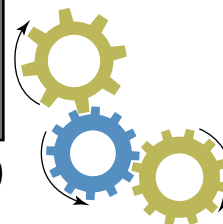
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)



Gini Ratio



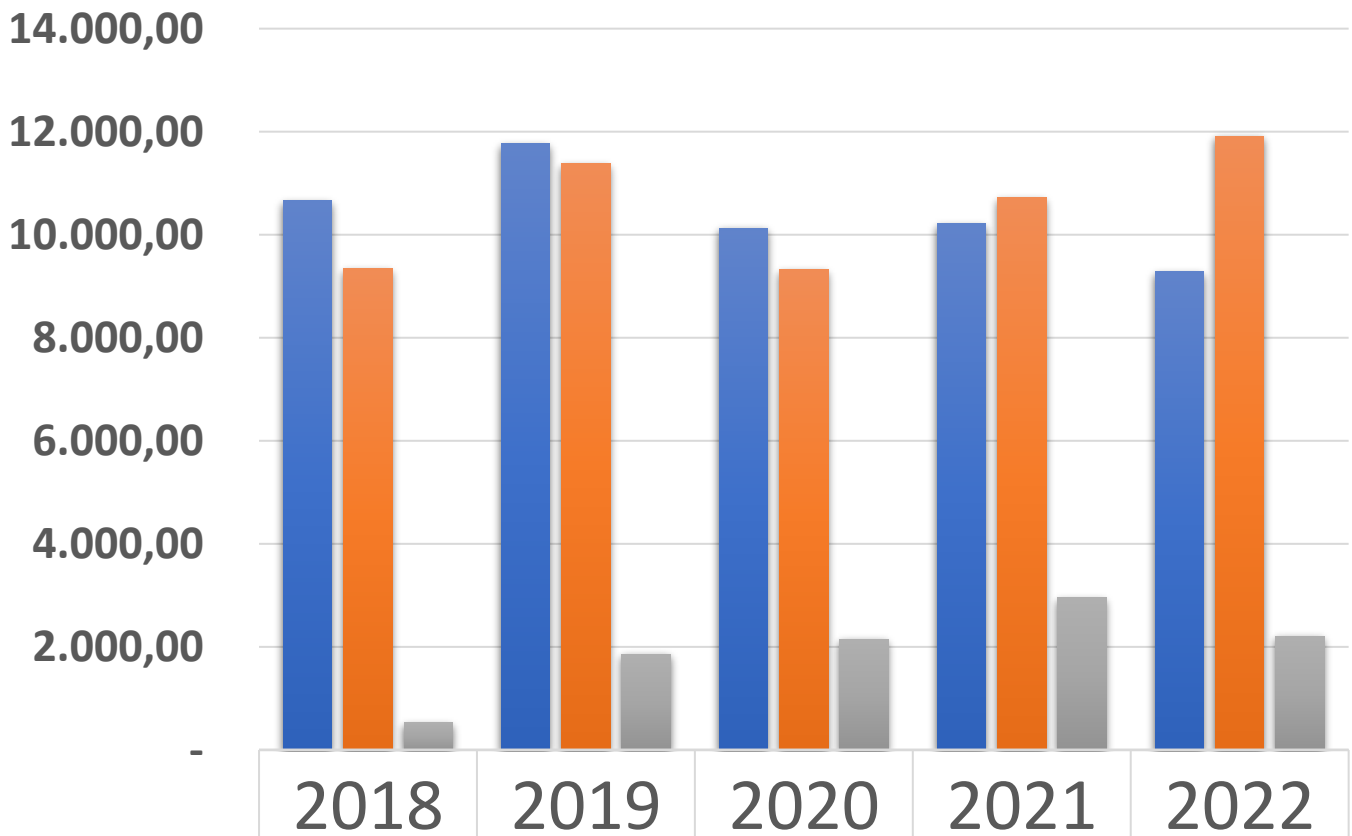
Capaian Indikator Makro Kalimantan Timur Tahun 2022 secara umum berangsur membaik yang sebelumnya di Tahun 2020 saat masih **Pandemi Covid-19**, mengakibatkan beberapa indikator mengalami penurunan tajam seperti penurunan LPE sebesar -2.90% dan peningkatan pengangguran sebesar 6.87%





Realisasi APBD Provinsi Kalimantan Timur

Sumber: djpk.kemenkeu.go.id



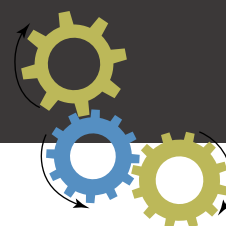
Realisasi APBD Provinsi Kalimantan Timur selama 5 Tahun mengalami dinamika yang fluktuatif, sebagaimana pada tahun 2021 dan 2022 menunjukan angka Belanja pada APBD cenderung tinggi jika dibandingkan dengan Pendapatan Daerah, hal ini tidak lepas dari kondisi Pandemi yang terjadi. Sehingga selanjutnya perlu Optimaliasi dalam APBD guna memaksimalkan capaian Sasaran dan Prioritas Pembangunan di Provinsi Kalimantan Timur.

Pendapatan	10.66	11.77	10.13	10.22	9.289
Belanja	9.345	11.38	9.328	10.72	11.91
Pembiayaan	537,5	1.861	2.149	2.950	2.210



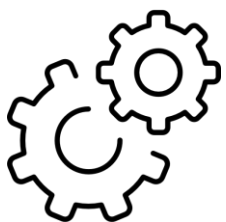
3

Norma dan Substansi RPD 2024-2026





Regulasi yang diintegrasikan dalam Penyusunan RPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026



**Penyusunan
Renstra PD**

Permendagri Nomor
86 Tahun 2017



**Penetapan
Indikator
Makro**

Peraturan Pemerintah
Nomor 13 Tahun
2019



**Nomenklatur
Program/Keg/
Sub Keg**

Permendagri 90 Tahun
2019-Kepmendagri 050-
5889



**Perumusan
Indikator
Kinerja**

Permendagri Nomor
18 Tahun 2020



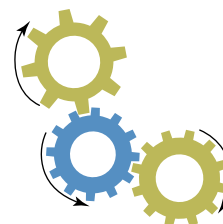
**Penyusunan
Perkada RPD**

Permendagri 120
Tahun 2018



**Penggunaan
SIPD**

Permendagri 70
Tahun 2019





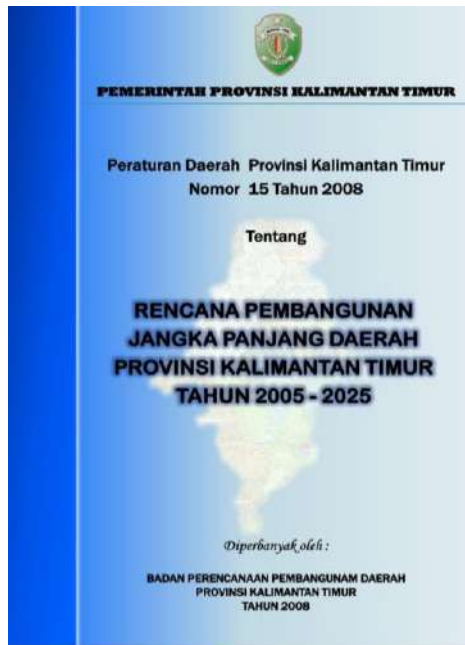
Dokumen Perencanaan Pembangunan yang Beririsan Dengan RPD Prov Kalimantan Timur Tahun 2024-2026




Perpres 18/2020
Sasaran dan Prioritas
Akhir serta PSN
RPJMN 2020-2024

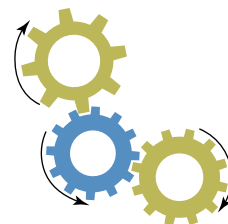
**Rencana
Pembangunan
Daerah
Provinsi
Kalimantan
Timur Tahun
2024-2026**

Arah Kebijakan
Pengembangan
Kewilayahan
Kabupaten/Kota



Perda 15/2008
Sasaran Pokok dan
Arah Kebijakan
Periode ke-IV

- 
- Evaluasi Capaian RPJMD sampai dengan Tahun 2022;
 - Evaluasi Capaian Sasaran Pokok pada Arah Kebijakan Periode ke-IV sampai dengan Tahun 2022;
 - Evaluasi Proyek Strategis Provinsi sampai dengan Tahun 2022.

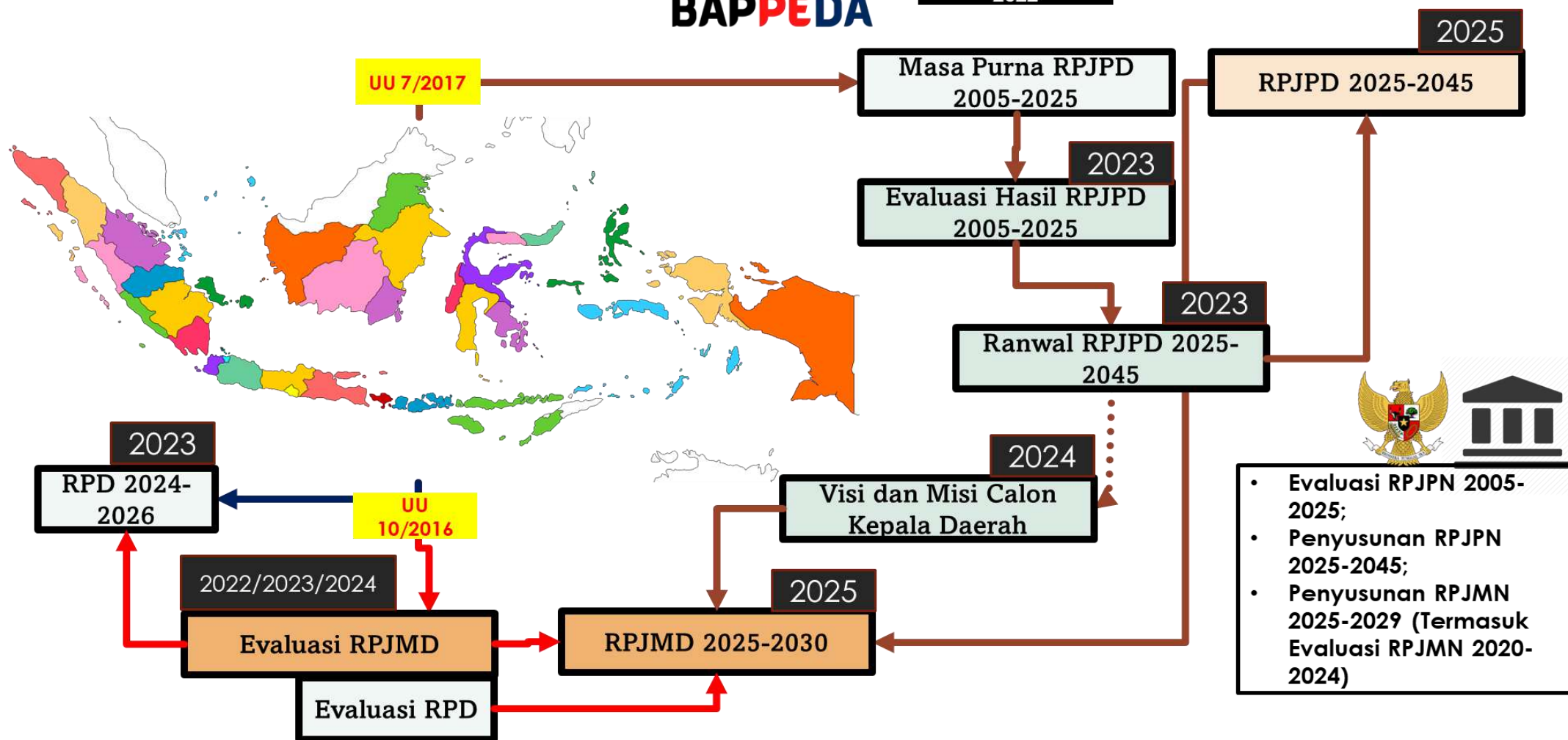




Agenda Strategis Perencanaan Tahun 2023-2025

RAKOR 2022
BAPPEDA

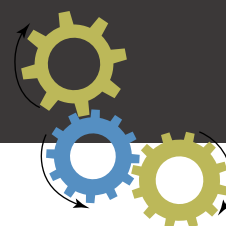
17-18 November
2022





4

Isu Strategis Nasional





ISU STRATEGIS NASIONAL

- 1 Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem
- 2 Penanganan *stunting*
- 3 Pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19
- 4 *Middle income trap*
- 5 Percepatan pembangunan infrastruktur
- 6 Pengurangan risiko bencana
- 7 Pasokan energi dan pangan
- 8 Peningkatan kualitas SDM
- 9 Reformasi birokrasi
- 10 Pilpres dan pilkada serentak tahun 2024
- 11 Perencanaan pembangunan jangka panjang 2025-2045
- 12 Pembangunan IKN di Kaltim



ARAHAN BAPAK PRESIDEN RI PADA RAPAT KOORDINASI NASIONAL KEPALA DAERAH DAN FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH 2023



“Ada 14 provinsi (angka kemiskinan ekstremnya) masih diatas nasional padahal kita tau target kita di 2024, kemiskinan ekstrem ini harus berada pada 0%. Ini target yang tidak mudah. Di 2022 (angka kemiskinan ekstrem nasional) masih 2% dan 14 provinsi diatas nasional. Semuanya sudah ada datanya, artinya targetnya siapa, sasarannya siapa sudah ada semuanya, penanganannya seperti apa juga Saya kira Saya sudah tidak perlu menyampaikan lagi, intervensi apa yang harus dilakukan semua penda sudah tau apa yang harus dilakukan.

Catatan:

1. Pada tanggal 29 September 2022 di Jakarta Conventional Center, Bapak Presiden telah merilis Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) yang menjadi basis data percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di pusat dan daerah.
2. Penanganan kemiskinan ekstrem dilakukan melalui 3 strategi sebagaimana tertuang dalam Inpres Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem

”

Sumber: Rakornas Kepala Daerah dan Forkopimda, 17 Januari 2023



1

TINGKAT KEMISKINAN EKSTREM PER PROVINSI PERIODE MARET 2021 (2,14%) PERIODE MARET 2022 (2,04%)



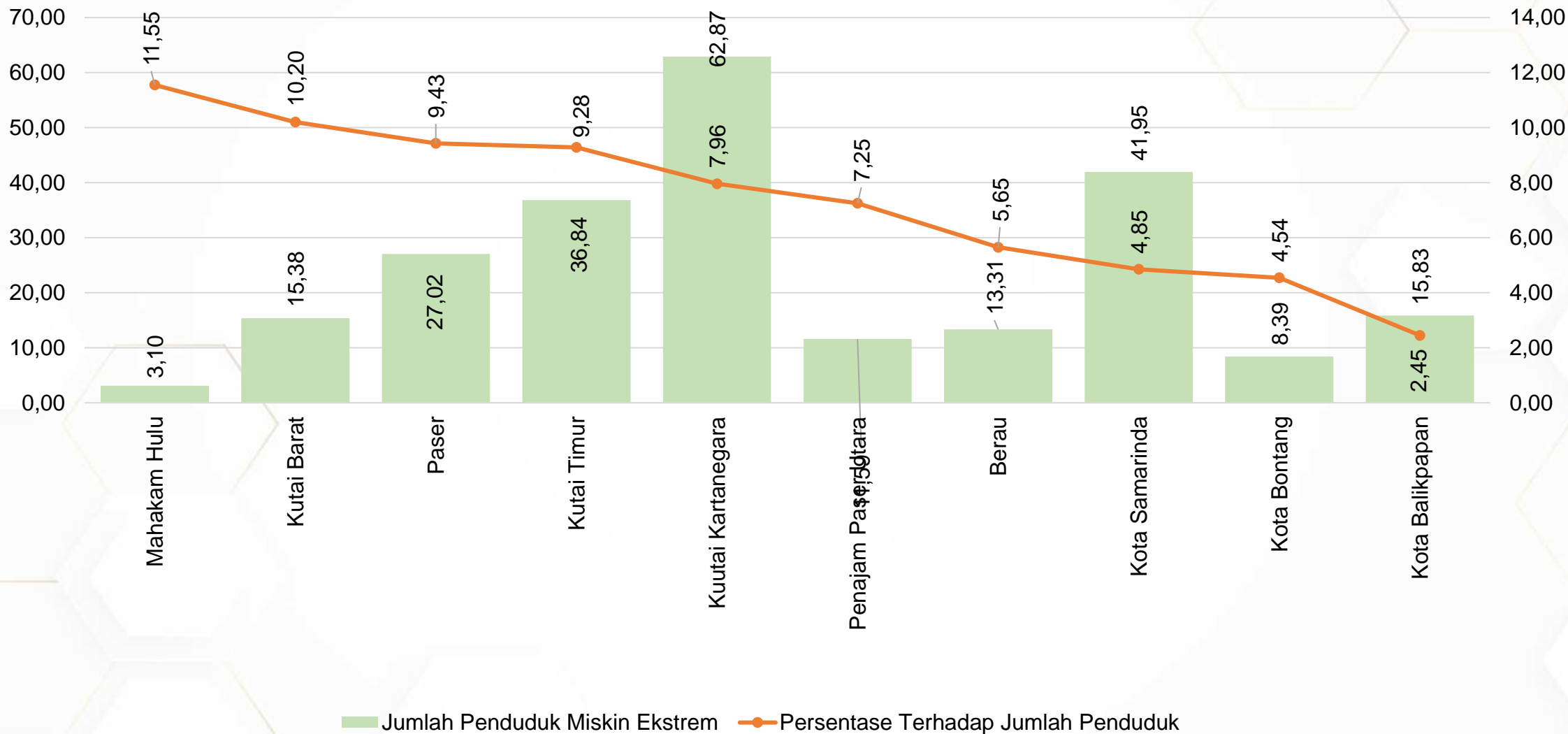
Catatan:

1. Secara nasional, terjadi penurunan tingkat kemiskinan ekstrem sebanyak 0,10% dari 2,14% (Maret 2021) menjadi 2,04% (Maret 2022).
2. Dari 34 Provinsi, **terdapat 20 Provinsi yang mengalami penurunan** persentase kemiskinan ekstrem termasuk Prov. Kalimantan Timur dan **14 Provinsi yang mengalami peningkatan** kemiskinan ekstrem

Sumber: Susenas BPS



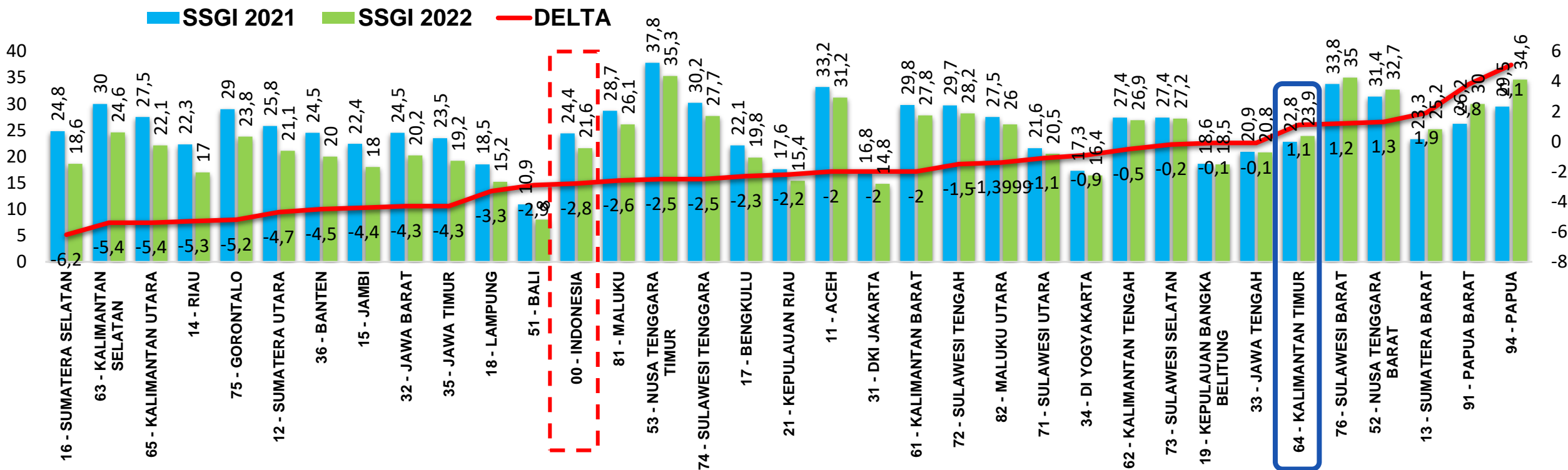
JUMLAH PENDUDUK DAN PERSENTASE **PENDUDUK MISKIN KABUPATEN/KOTA** **KALIMANTAN TIMUR** Tahun 2022





2

PREVALENSI STUNTING 2021 - 2022 DAN DELTA SSGI 2021 - SSGI 2022 (%)



Penurunan Prevalensi Tertinggi (Delta SSGI 2022 – SSGI 2021)

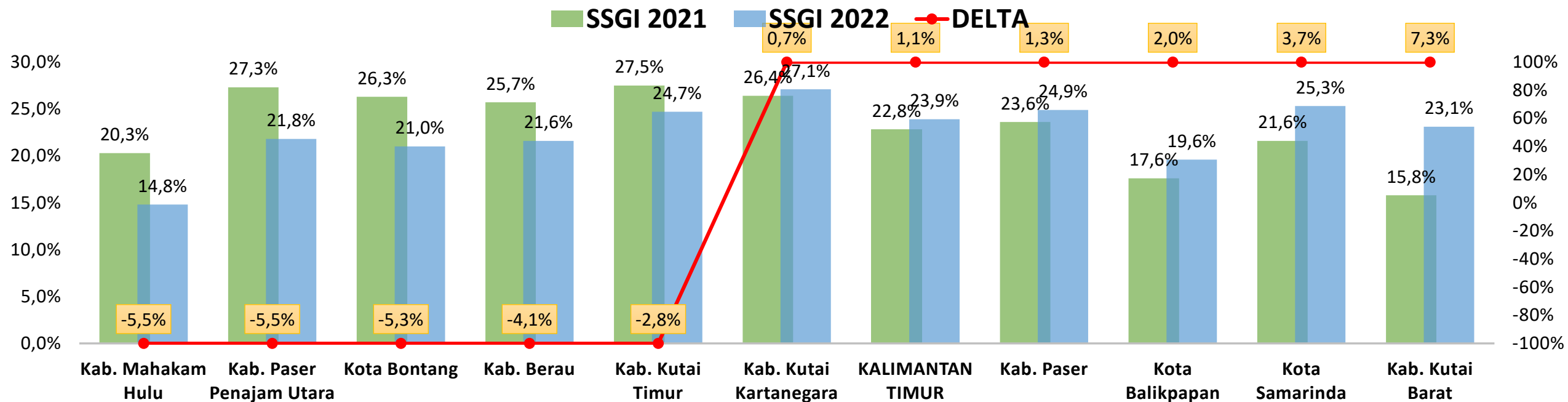
1. Sumatera Selatan : 6,2%
2. Kalimantan Selatan : 5,4%
3. Kalimantan Utara: 5,4%

Peningkatan Prevalensi (Delta SSGI 2022 – SSGI 2021)

1. Kalimantan Timur : 1,1%
2. Sulawesi Barat : 1,2%
3. Nusa Tenggara Barat : 1,3%
4. Sumatera Barat : 1,9%
5. Papua Barat : 3,8%
6. Papua : 5,1%



PREVALENSI STUNTING PROVINSI KALIMANTAN TIMUR



Penurunan Prevalensi (Delta SSGI 2022 – SSGI 2021)

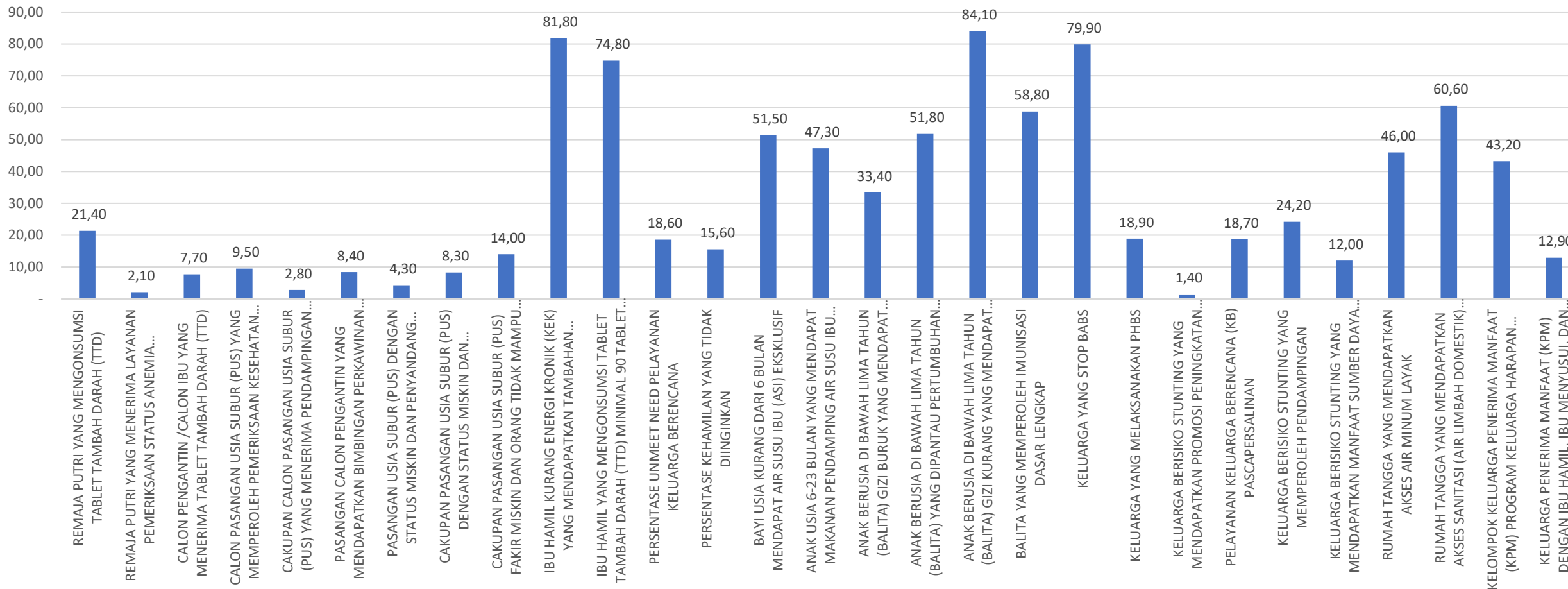
1. Kab. Mahakam Hulu 5,5%
2. Kab. Paser Penajam Utara 5,5%
3. Kota Bontang 5,3%
4. Kab. Berau 4,1%
5. Kab. Kutai Timur 2,8%

Peningkatan Prevalensi (Delta SSGI 2022 – SSGI 2021)

1. Kab. Kutai Kartanegara 0,7%
2. Kab. Paser 1,3%
3. Kota Balikpapan 2,0%
4. Kota Samarinda 3,7%
5. Kab. Kutai Barat 7,3%



CAKUPAN LAYANAN 29 ESENSIAL PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2022



Cakupan layanan yang terendah di Provinsi Kalimantan Timur adalah:

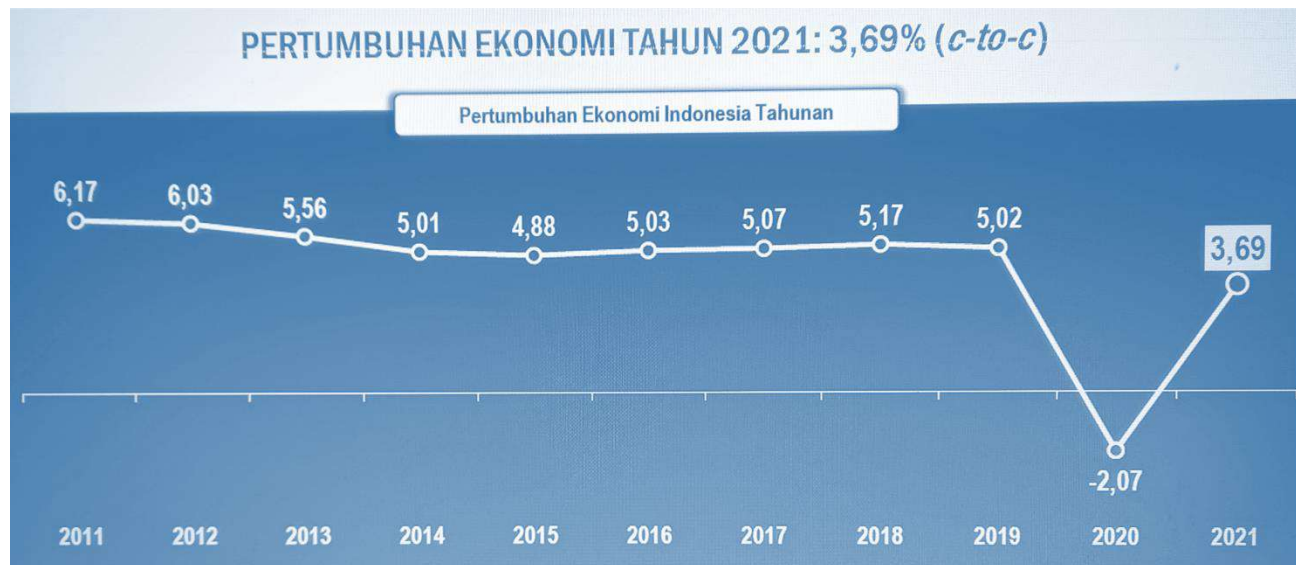
- Keluarga berisiko stunting yang mendapatkan promosi peningkatan konsumsi ikan dalam negeri sebesar 1,4 %
- Remaja putri yang menerima layanan pemeriksaan status anemia (hemoglobin) sebesar 2,1%

Keterangan : Untuk Cakupan Unmeet Need dan Kehamilan Yang Tidak Diinginkan **semakin rendah persentasenya semakin baik**

Sumber Data : Web aksi bangda 2023



3 PEMULIHAN EKONOMI PASCA PANDEMI COVID-19

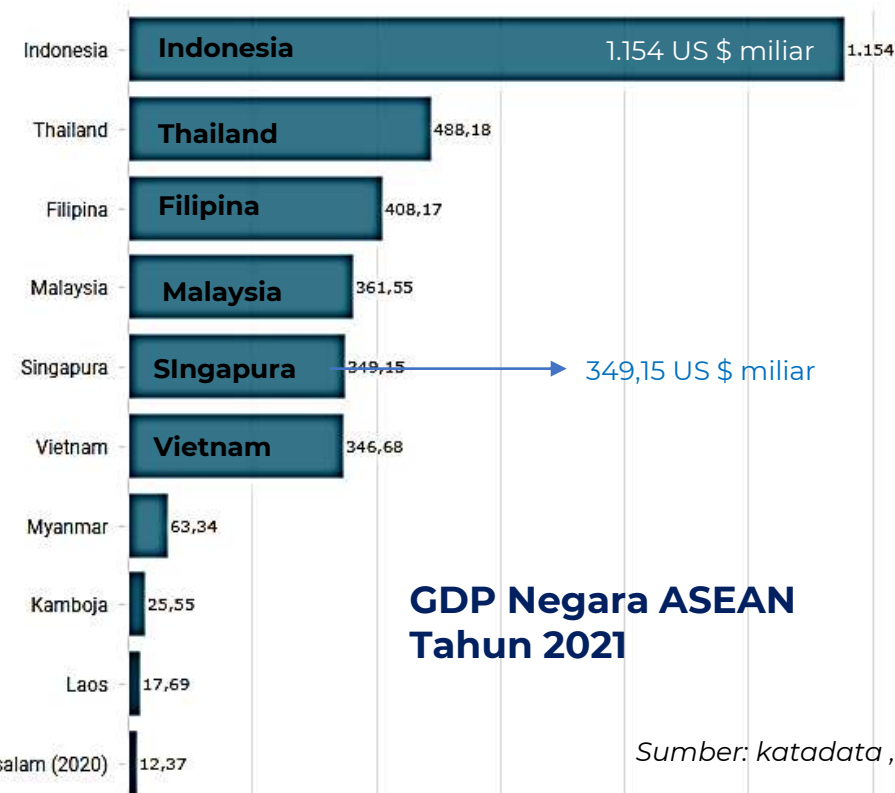


Sumber: BPS, 2022

Sejumlah langkah perlu diambil untuk mewujudkan agenda pemulihan ekonomi berkelanjutan pasca pandemi. Di antaranya adalah **penentuan kembali sektor prioritas, pengembangan UMKM, mempromosikan pasar kerja, menggandakan manfaat bantuan tunai, memaksimalkan dampak stimulus fiskal, serta mendorong inovasi pembiayaan hijau.**

Southeast Asia	2.9
• Indonesia	3.7
• Malaysia	3.1
• Philippines	5.6
• Singapore	7.6
• Thailand	1.6
• Vietnam	2.6

LPE Negara ASEAN Tahun 2021



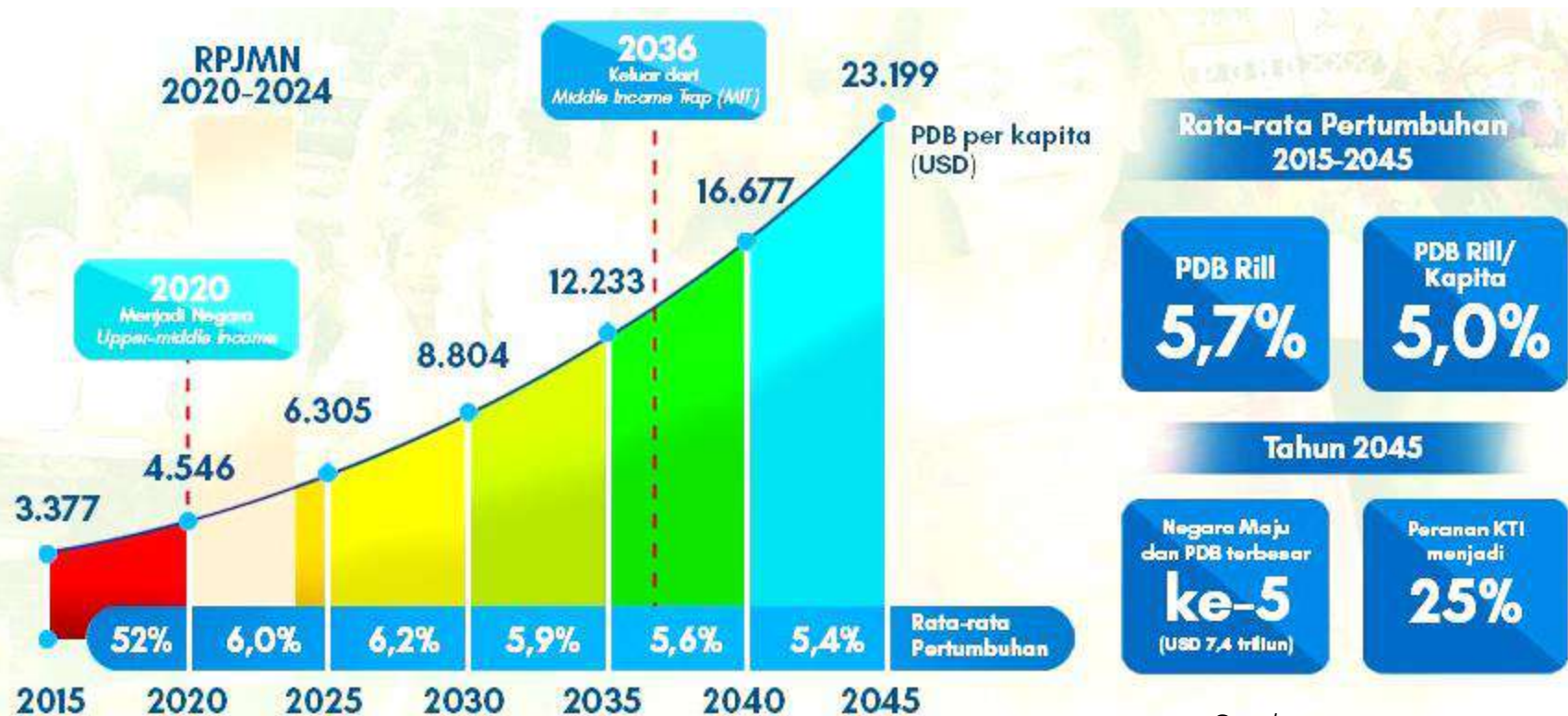
GDP Negara ASEAN Tahun 2021

Sumber: katadata, 2022





4 MIDDLE INCOME TRAP



Sumber:
Ranpenas

Gross Domestic Product (GDP) of Indonesia:

	2019	2020	2021
Per Capita GDP (in US dollars)	4,174.9	3,911.7	4,349.5
GDP Current Prices (in IDR trillion)	15,833.9	15,434.2	16,970.8

Struktur perekonomian Indonesia dan tingkat produktivitas nasional perlu diperkokoh melalui transformasi struktural perekonomian. Ini bertujuan agar Indonesia dapat keluar dari jebakan kelas menengah atau *middle-income trap*

Maksud dari terjebak dalam negara berpendapatan menengah, yakni suatu negara yang tidak bisa naik menjadi negara maju. Sebab, pendapatan per kapita masih berada di kisaran USD 4.000 sampai USD 12.000

Upaya yang dapat dilakukan antara lain meningkatkan kualitas SDM, pembangunan infrastruktur, reformasi birokrasi, dan regulasi

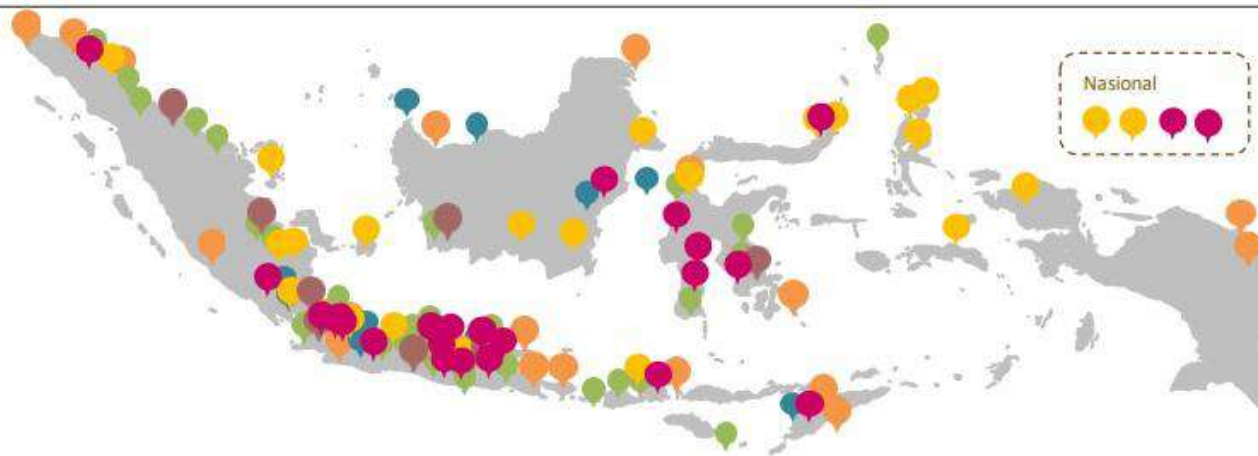




5

PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR

Sejak tahun 2016 sampai dengan Juni 2022, sebanyak 135 PSN Selesai dengan nilai investasi Rp 858 Triliun



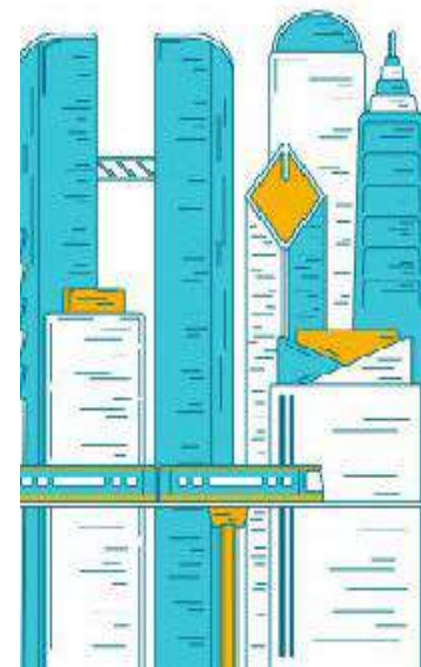
Selesai 2016	Selesai 2017	Selesai 2018	Selesai 2019	Selesai 2020	Selesai 2021	Selesai Sem 1 2022
20 Proyek (Rp 33,3 T)	10 Proyek (Rp 61,4 T)	32 Proyek (Rp 207,4 T)	30 Proyek (Rp 165,3 T)	12 Proyek (Rp 123,1 T)	24 Proyek (Rp 125,9 T)	7 Proyek (Rp 138,1 T)
<ul style="list-style-type: none">7 Bandara1 Jalan Tol6 Bendungan1 Pelabuhan1 Jalur Pipa Gas4 PLBN	<ul style="list-style-type: none">2 Jalan Tol1 Jalan Akses1 Bandara1 Fasilitas Gas3 PLBN1 Bendungan1 Saluran Irigasi	<ul style="list-style-type: none">2 Kereta Api4 Bendungan1 Irigasi10 Jalan Tol5 KEK1 Bandara4 Kawasan Industri4 Smelter1 Sentra Kelautan Perikanan	<ul style="list-style-type: none">4 Bandara4 Bendungan9 Jalan6 Kawasan2 Kereta1 Pelabuhan2 Smelter2 Teknologi	<ul style="list-style-type: none">1 Bandara1 Kereta2 Jalan Tol1 Pelabuhan1 SPAM3 Kawasan Industri3 Bendungan	<ul style="list-style-type: none">6 Jalan Tol1 Kereta1 Kawasan1 Perumahan2 SPAM11 Bendungan1 Pelabuhan1 Teknologi	<ul style="list-style-type: none">3 Kawasan1 Pelabuhan1 Jalur Transmisi1 PSEL1 PLBN

Perpres 109/2020

Perpres 56/2018

Perpres 58/2017

Perpres 3/2016



Sumber: KPPIP, 2022





6 PENGURANGAN RISIKO BENCANA



BENCANA INDONESIA 2021

JUMLAH KEJADIAN PER-JENIS BENCANA TAHUN 2021

BENCANA ALAM

GEMPA BUMI	24
ERUPSI GUNUNGAPI	1
KARHUTLA	579
KEKERINGAN	15
BANJIR	1.794
TANAH LONGSOR	1.321
CUACA EKSTREM	1.577
GELOMBANG PASANG & ABRASI	91

SEBARAN KEJADIAN BENCANA ALAM TANGGAL 1 JANUARI - 31 DESEMBER 2021



Sampai tanggal 31 Desember 2021, tercatat jumlah kejadian bencana sebanyak 5.402 kejadian. Kejadian bencana alam mendominasi adalah bencana banjir, kemudian diikuti cuaca ekstrem dan tanah longsor. Bencana alam menimbulkan terdampak dan mengungsi 7.630.692 jiwa, sedangkan sebanyak 728 jiwa meninggal dunia dan 87 hilang serta 14.915 jiwa luka-luka.

**TOTAL BENCANA
TAHUN 2021** **5.402***
1 Januari - 31 Desember 2021

DAMPAK BENCANA ALAM PERIODE 1 JANUARI - 31 DESEMBER 2022



DAMPAK KERUSAKAN BENCANA ALAM TAHUN 2021



Sumber: BNPB, 2022





7 KETAHANAN ENERGI DAN PANGAN



Urban Farming dan Lahan
Pertanian Pangan Berkelanjutan

Energi Baru Terbarukan



Sumber: Kemenkeu, 2022





8 PENINGKATAN KUALITAS SDM



IPM Tahun 2021



Sumber: BPS, 2022



www.kemendagri.go.id



Kemendagri_RI



kemendagri



kemendagri



9 REFORMASI BIROKRASI

GRAND DESIGN REFORMASI BIROKRASI

PERPRES NOMOR 81 TAHUN 2010 TENTANG *GRAND DESIGN*
REFORMASI BIROKRASI 2010-2025

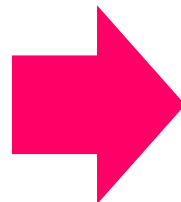




10 PILPRES DAN PILKADA SERENTAK TAHUN 2024



Situasi politik yang semakin “memanas”



Pendanaan penyelenggaraan pileg dan pilkada





11 PERENCANAAN PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG

Permendagri 86/2017

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 17 TAHUN 2007

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG NASIONAL

TAHUN 2005 – 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

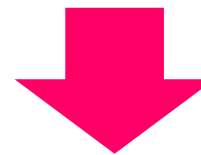
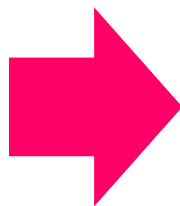
- Menimbang :
- bahwa perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengakibatkan terjadinya perubahan dalam pengelolaan pembangunan, yaitu dengan tidak dibuatnya lagi Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) sebagai pedoman penyusunan rencana pembangunan nasional;
 - bahwa Indonesia memerlukan perencanaan pembangunan jangka panjang sebagai arah dan prioritas pembangunan secara menyeluruh yang akan dilakukan secara bertahap untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - bahwa Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang ditetapkan dengan Undang-undang;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025 dengan Undang-Undang;

Paragraf 2

Penyusunan Rancangan Awal RPJPD

Pasal 18

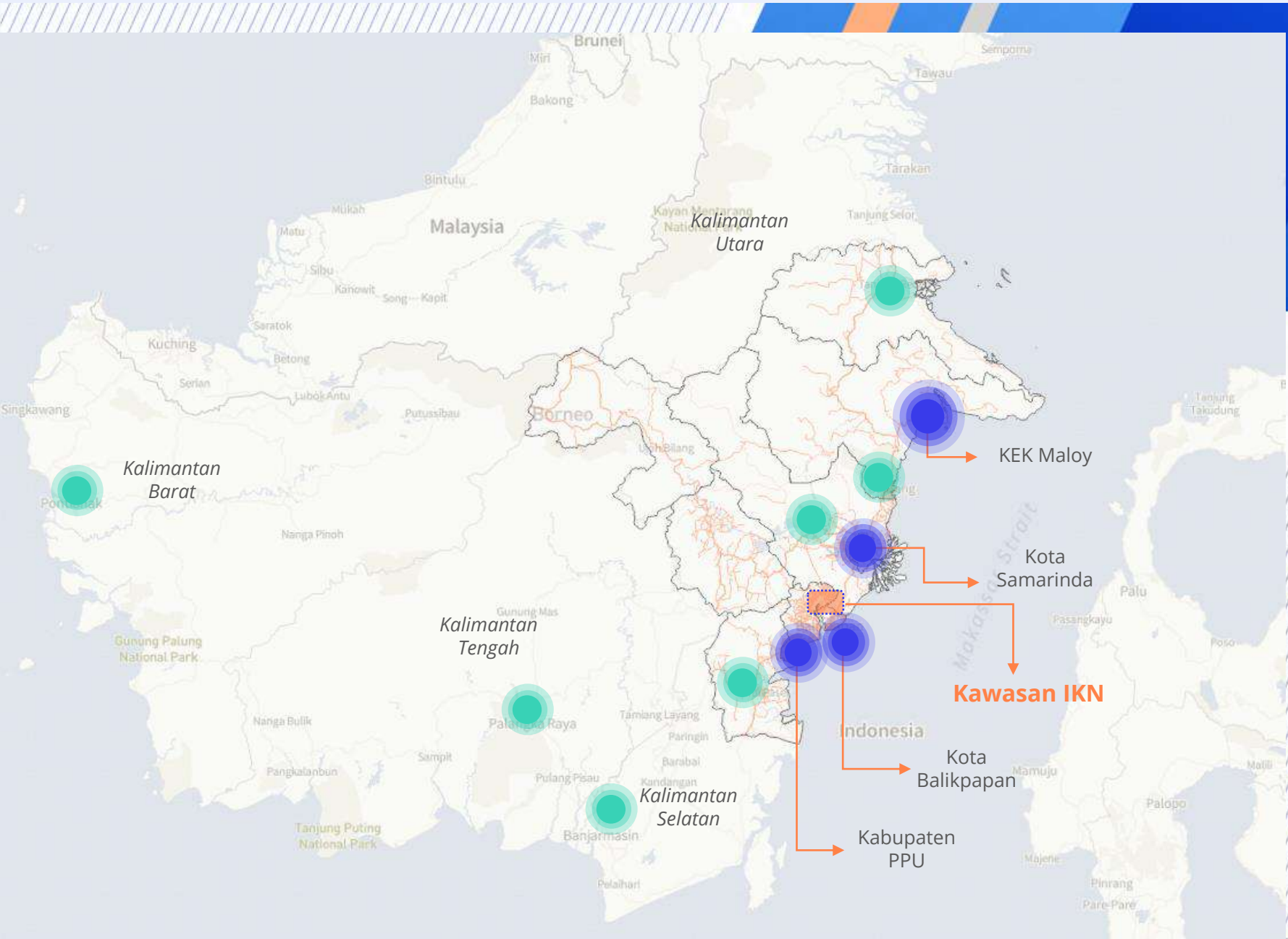
- (1) Penyusunan rancangan awal RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum RPJPD periode sebelumnya berakhir.
- (2) Kurun waktu RPJPD sesuai dengan kurun waktu RPJPN.



RPJPN dan RPJPD akan berakhir pada tahun 2025 sehingga harus dipersiapkan penyusunan RPJP tahun 2025-2045



Potensi Kerja Sama Regional untuk Mendukung Superhub IKN



Ekonomi & Industri



Logistik & konektivitas



SDM & ketenagakerjaan



Perlindungan & pengelolaan LH



Pariwisata & Ekraf



Energi & ketenagalistrikan



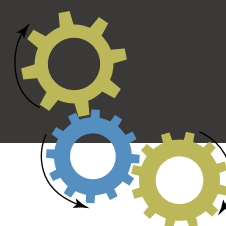
Pertanian & ketahanan pangan



Pengelolaan Sumber Daya Air

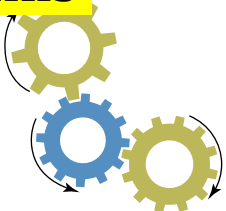
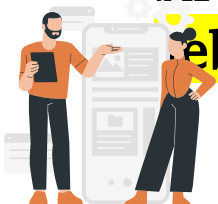


5 Penutup



Penutup

- ❑ Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memanfaatkan Forum Konsultasi Publik untuk **menampung berbagai masukan dari Pemangku Kepentingan** termasuk DPRD dan masyarakat secara luas dalam rangka mempertajam substansi perencanaan startegis yang dirumuskan, untuk dituangkan dalam Berita Acara sebagai bahan **penyempurnaan** menjadi Rancangan Akhir RPD;
- ❑ Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur **melakukan koordinasi** dengan Pemerintah tingkat Pusat dalam memetakan **arahan pengembangan kewilayahan**;
- ❑ Melakukan konsolidasi secara terpadu dengan seluruh pemangku kepentingan sebagai upaya **penyiapan strategi bersama** dalam pencapaian Sasaran Pokok akhir RPJPD di Tahun 2025 dan sekaligus menyiapkan dokumen perencanaan yg **dinamis sebagai jembatan** menuju penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045.





TERIMA KASIH